

Bakri La Suhu, S.IP.,M.A
Adegair Ibrahim, S.IP



KEBIJAKAN PENANGANAN
**ILLEGAL
FISHING**
Di Wilayah Kepulauan





eureka
media aksara

Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2023

-  0858 5343 1992
-  eurekamediaaksara@gmail.com
-  Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-270-3



9 786231 202703

KEBIJAKAN PENANGANAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH KEPULAUAN

Bakri La Suhu, S.IP.,M.A
Adegair Ibrahim, S.IP



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

KEBIJAKAN PENANGANAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH KEPULAUAN

Penulis : Bakri La Suhu, S.IP.,M.A
Adegair Ibrahim, S.IP

Editor : Abdullah Kaunar
Bakri La Suhu

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Meilita Anggie Nurlatifah

ISBN : 978-623-120-270-3

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Indonesia merupakan negara kepulauan, berbagai gugusan pulau tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Secara demografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau. Pijakan kepulauan inilah, menjadikan Indonesia kaya akan hasil dari kelautan dan perikanan. Namun persoalan hasil laut, seringkali terjadi tindakan kejahatan, termasuk pencurian ikan di daerah terlarang dan bahkan pencurian ikan secara illegal.

Persoalan pencurian ikan secara illegal (illegal fishing) di perairan Indonesia, sesungguhnya di perlukan berbagai langkah-langkah kebijakan dari pemerintah untuk dapat mengatasinya. Buku ini tentunya dapat menjawab kegelisahan atas permasalahan illegal fishing di wilayah kepulauan. Buku ini terdiri dari beberapa Pokok-pokok Bahasan, yakni BAB I. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY) menguraikan tentang Pengertian Kebijakan (Policy) & Ruang Lingkup Kebijakan Publik, Teori Pembuatan Keputusan, dan Masalah Publik.

Pada BAB II. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK menguraikan tentang Konsep Implementasi, Kebijakan-kebijakan yang cenderung menghadapi Masalah dan Sistem Kebijakan Publik. BAB III. PROBLEMATIKA ILLEGAL FISHING menguraikan Masalah illegal fishing di Kepulauan dan Dasar Hukum Penanganan illegal fishing. BAB IV. TINDAKAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH KEPULAUAN menguraikan Pengertian illegal fishing, Potret Instansi Penegak illegal Fishing, Pelaksanaan illegal Fishing di Maluku Utara, serta tindakan dan penanganan illegal Fishing Di Maluku Utara.

Buku ini bagian berkaitan dengan kebijakan dalam penanganan illegal fishing di wilayah kepulauan. Olehnya itu, karya buku ini mungkin masih jauh dari sempurna, saran dan kritikan dari pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan karya buku selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Aamiin.

Ternate, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY) ...	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Kebijakan (<i>Policy</i>) & Ruang Lingkup Kebijakan Publik	5
C. Teori Pembuatan Keputusan.....	14
D. Masalah Publik.....	18
BAB 2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY).....	21
A. Konsep Implementasi	21
B. Kebijakan-kebijakan yang cenderung menghadapi Masalah	38
C. Sistem Kebijakan Publik	44
BAB 3 PROBLEMATIKA ILLEGAL FISHING	46
A. Pendahuluan.....	46
B. Masalah illegal fishing di Kepulauan.....	49
C. Dasar Hukum Penanganan illegal fishing	52
BAB 4 TINDAKAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH KEPULAUAN.....	55
A. Pengertian Illegal Fishing.....	55
B. Potret Instansi Penegak <i>illegal Fishing</i>	58
C. Pelaksanaan <i>illegal Fishing</i> di Maluku Utara.....	69
D. Tindakan dan Penanganan <i>illegal Fishing</i> Di Maluku Utara	76
E. Kesimpulan.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
TENTANG PENULIS	84



KEBIJAKAN PENANGANAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH KEPULAUAN

Bakri La Suhu, S.IP.,M.A
Adegair Ibrahim, S.IP



BAB

1

KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK (*PUBLIC POLICY*)

A. Pendahuluan

Istilah kebijakan atau kebijakan publik sudah sering kita dengar melalui berbagai media massa (baik melalui surat kabar, televisi, ataupun internet) maupun dalam pembicaraan sehari-hari. Istilah tersebut sering dikaitkan dengan bidang tertentu misalnya kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan, kebijakan tenaga kerja, dan lainnya; atau dibicarakan ketika dikaitkan suatu persoalan (masalah) yang terjadi dalam kehidupan kita, misalnya kebijakan pembinaan pedagang kaki lima, kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, kebijakan pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.

Seringkali, ketika ada suatu masalah dalam kehidupan masyarakat, maka banyak yang mempertanyakan “bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasinya?” Masyarakat sering mendiskusikan, mengkritisi, atau mempertanyakan berbagai isu kebijakan seperti pendidikan mahal, krisis ekonomi yang tidak kunjung habis, kualitas pelayanan publik yang buruk, beras raskin yang tidak sampai sasaran. Bahkan tanpa disadari, sering dipersoalkan dampak dari kebijakan itu sendiri, misalnya kebijakan otonomi daerah menyebabkan isu-isu kebijakan juga berkembang pada level lokal seperti

BAB

2

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (*PUBLIC POLICY*)

A. Konsep Implementasi

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1991:3) dalam Leo Agustino (2008:138) yaitu :

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang

BAB 3

PROBLEMATIKA *ILLEGAL FISHING*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (archipelagic state) yang tingkat kejahatan transnasionalnya relatif tinggi dikarenakan letak geografis Indonesia yang strategis dan sistem pengawasan keamanan maritim yang lemah membuat para pelaku kejahatan transnasional bisa dengan sangat mudah keluar-masuk di perairan Indonesia. Faktor inilah yang melatarbelakangi tingginya tingkat transnational crime sehingga menjadi ancaman di perairan Indonesia. Salah satu permasalahan keamanan maritim yang menjadi ancaman bagi Indonesia adalah penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).

Letak Indonesia yang strategis dibawah garis khatulistiwa, berada diantara dua benua dan dua samudera, sehingga laut Indonesia dijadikan sebagai laboratorium laut terlengkap. Secara demografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau. Panjang garis pantai lebih ari 81.000 km, luas laut teritorial 5,8 juta km². Konfigurasi Pulau yang sedemikian banyak tersebut, merupakan sebagian besar pulau-pulau kecil yang diperkirakan lebih dari 10.000 buah (Andi Iqbal, 2013:308).

BAB 4

TINDAKAN *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH KEPULAUAN

A. Pengertian *Illegal Fishing*

Illegal Fishing merupakan istilah yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media masa dan dijadikan sebagai suatu kajian hukum yang menarik bagi peneliti bahkan para aktivis. Apabila dilihat secara terminologi *Illegal Fishing* dari pengertiannya secara harfiah “*Illegal*” yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “*Fishing*” yaitu penangkapan ikan sebagai mata pencarian atau tempat penangkapan ikan (Febrica, 2017).

Adapun pengertian *Illegal Fishing* menurut International Plan Of Action (IPOA) yang diartikan sebagai IUU-Fishing (*Illegal, Unreported, Unregulated*) Fishing merupakan suatu kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah, kegiatan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang telah 21 tersedia (Aris Subagiyo, 2017:75).

Dari berbagai literatur mengenai *Illegal fishing*, dapat dipahami *Illegal fishing* sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, segala aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Penerbit CV. Alfabeta Bandung.
- Agostiono , (2010).*Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn*, Rajawali Press, Jakarta,
- Amiruddin Suwaib, 2012, *Kebijakan Dapat Lahirkan Konflik*, Sosiolog dari Untirta (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) <http://radarbanten.com/newversion/utama/6756-kebijakan-dapat-lahirkan-konflik.html>
- Darwin Muhadjir, 2006. *Proses Kebijakan, Pelatihan Analisis Kebijakan Publik (Pontianak-Kalimantan Barat)*. Magister Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta.
- Dunn N. William,1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye R. Thomas, 1992, *Understanding Public Policy (Seventh Edition)*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
- Gurr, Robert, Ted, 1980, *Handbook of Political Conflict, Theory and Research*, New York, The Free Press
- Islamy M. Irfan, 2004, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jones O Charles, 1994, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* , Rajawali Press, Jakarta,
- Lubis, M. .Solly, 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- LA SUHU, Bakri. *Kebijakan Publik*. 2023.

- Nurcholis Hanif, 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.
- Parson Waynes, 2005. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik analisis Kebijakan*, Kencana, Jakarta.
- PARYANTO, Paryanto, et al. Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2022, 4.2: 150-164.
- Perwanto Agus. No.10-15 *Belajar dari Kasus Ranperda KWTE Kabupaten Bintan*. Available at <http://batampos.co.id/Proses-Pengambilan-Kebijakan.html>.
- Santoso Purwo & Nur Azizah, 2010, *Kebijakan Publik & Good Governance*. Bahan Ajar Kuliah, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Syamsuddin Haris, 1998. *Pola dan Kecenderungan Konflik Partai Masa Orde Baru*. Analisa, No.5/Th.XVII/Mei 1998. Artikel
- Sabatier, Paul. (1986). "Top Down And Bottom Up Approaches To Implementation Researchjournal Of Public Policy 6, (Jan),
- Santoso Amir, 1988, *Analisis Kebijakan Publik, Suatu Pengantar*, Jurnal Ilmu Politik 3, Jakarta, Gramedia.
- Schroder. Peter, 2003, *Strategi politik*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung.
- Surbakti Ramlan, 2007, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Grasindo.

- SUAIB, Rahmat; LA SUHU, Bakri; PORA, Rasid. *Konflik Sengketa Tanah Bandara di Wilayah Tarakani*. 2022.
- Subarsono, 2006. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sudibyakto, 2010, *Kebijakan dalam Situasi Darurat Bencana*. Bahan Ajar Kebijakan Publik & Good Governance. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wahab Abdul, Solichin, 2001 & 2002 (Edisi Revisi), *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.
- _____ 2008, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Edisi Revisi, Penerbit MedPress, Yogyakarta.
- Widodo Joko, 2009, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yeremias T. Keban, 1994, *Pengantar Administrasi Publik*, Modul Untuk Matrikulasi Administrasi Publik, MAP UGM, Yogyakarta.
- _____, 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)* Gava Media, Yogyakarta.
- Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

TENTANG PENULIS



Bakri La Suhu, S.IP, M.A, Lahir di Pulau Obi khususnya Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Mei 1985. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar pada SD Negeri Mano-Obi Selatan Tahun 1998, MTs Alkhairaat Mano-Obi Selatan Tahun 2001, MAN Model Ternate

Tahun 2004. Menyelesaikan pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun 2008 dan melanjutkan Program Magister (S-2) Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2010-2011).

Pada tahun 2012, penulis kembali mengabdikan sebagai Dosen dan kemudian tahun 2013 diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2018 hingga sekarang, penulis dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Menikah dengan Ida Kene, Amd.Keb dan dikaruniai tiga orang anak (Muhammad Fadlan B. La Suhu, Citria Vidia Putri Hi. La Suhu dan Muhammad Zhafran Hi. La Suhu).

Beberapa artikel tulisan yang pernah di public baik jurnal Internasional terindeks Schopus yakni; Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party (2018), Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku (2018). Sedangkan pada jurnal nasional yakni; Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah

Maluku Utara (2019), Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan, (2019), REFUGEE AND LAND DISPUTE (A Case Study at Gamsungi and Tosoa Villages, South Ibu District, Regency of West Halmahera, Year 2015) (2019), SOCIAL CONFLICTS IN CHURCH DEVELOPMENT IN KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT (Study of Conflict Resolution among Citizens in Church Development In Adu Village) (2019), Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara (2020), Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan (2020), Covid-19 Dan Ancaman Keselamatan Warga Negara (2021), Benang Kusut BLT Dana Desa Tahun 2020 di Pulau Gamumu Kecamatan Obi Selatan (Studi tentang Implementasi Pembagian BLT-DD di Desa Mano) (2021), FEKTIVITAS KERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN PROGRAM BERAS BAGI MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) TAHUN 2016 (Studi Di Desa Gam Ici Kecamatan Ibu) (2021), Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (2022), Peran Lurah Dalam Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) Tahun 2017 DI Pulau Ternate (Studi Kantor Lurah Soa Kecamatan Ternate Utara) (2022), Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Talagamori Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan (2022), dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 Di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan (2022). Article tersebut dapat ditelusuri pada google scholar ID QZOnpycAAAAJ, Sinta ID 6096386 dan Scopus ID 57205478258 serta Garuda 1029082.

Buku yang pernah penulis tulis yakni “KONFLIK PEREBUTAN RUANG HIDUP (Suatu Pendekatan Kebijakan & Konsensus) tahun 2021”, “KONSPIRASI ELIT Dibalik PEMEKARAN DAERAH” tahun 2022, “SENGKETA TAPAL BATAS di TANAH KESULTANAN” tahun 2022, “BATAS DAERAH Dalam PUSARAN KONFLIK” tahun 2022, GRAND DESIGN PELAYANAN KEPOLISIAN di WILAYAH KEPULAUAN” tahun 2022 dan “POTRET BURAM PEMERINTAHAN : Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik” tahun 2022, serta “Konflik Sengketa Tanah Bandara Di Wilayah Tarakani” tahun 2022. Pada tahun 2023, beberapa Buku yang pernah penulis tulis antara lain “PEMIMPIN IDEAL CATATAN UNTUK CALON KEPALA DAERAH”, “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT Di Wilayah Kepulauan” dan “PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Konsep dan Aplikasi” serta “Kebijakan Publik”.



Adegair Ibrahim, S.IP, Lahir di Matsa pada tanggal 01 Desember 1972. Menempuh pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2019-2023).

Penulis merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada Kepolisian Daerah (POLDA) Maluku Utara yang di lantik sejak tahun 1994 dan ditempatkan pertama pada Kepolisian Resor Fak-Fak (Polres Fak-Fak) tahun 1994 hingga Tahun 2005 dan kemudian di Mutasi ke Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara Tahun 2005 hingga sekarang, penulis ditempatkan pada bagian Peneggakan Hukum Dit Polairud (Subdit Gakkum) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara.